



HK.04.01/87B

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 012 /M.PPN/10/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI STATE OWNED ENTERPRISE GOVERNANCE AND PRIVATIZATION
PROGRAMDENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata pengelolaan alokasi sumberdaya pada sektor publik, meningkatkan profitabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan meningkatkan partisipasi swasta dalam kegiatan komersial BUMN diperlukan seperangkat kebijakan yang tertuang dalam matriks kebijakan sebagai suatu prasyarat pinjaman luar negeri yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam APBN;
- b. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf a di atas diperlukan delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan *Asian Development Bank* (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait yang terdiri atas Kantor Menteri Negara BUMN, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995, tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.009/Ka/01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *STATE OWNED ENTERPRISE GOVERNANCE AND PRIVATIZATION PROGRAM* DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK*.

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Tim Perunding dan Tim Teknis untuk melakukan negosiasi *State Owned Enterprise Governance and Privatization Program* dengan *Asian Development Bank* pada tanggal 29-30 Oktober 2001 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *State Owned Enterprise Governance and Privatization Program* dengan *Asian Development Bank* tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;

KETIGA: ...

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *State Owned Enterprise Governance and Privatization Program* dengan *Asian Development Bank* tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 26 Oktober 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : Kep. 012 /M.PPN/10/2001
TANGGAL : 26 Oktober 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI
STATE OWNED ENTERPRISE GOVERNANCE
AND PRIVATIZATION PROGRAM DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUNDING

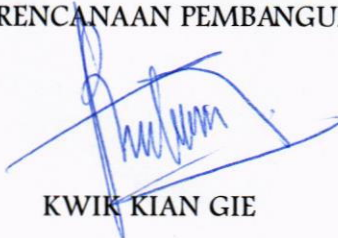
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bacelius Ruru
Sekretaris Menteri Negara BUMN | sebagai Ketua |
| 2. Bambang Bintoro Sudjito
Deputi Bidang Produksi, Perdagangan
dan Prasarana, Bappenas | sebagai anggota |
| 3. Herwidayatmo
Kepala Bapepam | sebagai anggota |
| 4. Muzni Tambusay
Direktur Jenderal Bina Pengawasan
Departemen Tenaga Kerja | sebagai anggota |
| 5. Parikesit Suprpto
Direktur Privatisasi dan Restrukturisasi
Kantor Menneq BUMN | sebagai anggota |
| 6. Edi Karsanto
Direktur Dana Luar Negeri
Departemen Keuangan | sebagai anggota |
| 7. Freddy Herman Tulung
Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral
Bappenas | sebagai anggota |
| 8. Bima Haria Wibisana
Direktur Analisis Investasi dan Pasar Modal
Bappenas | sebagai anggota |
| 9. Eiko Whismulyadi
Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM,
Bappenas | sebagai anggota |

TIM...

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Arif Budiman
Kantor Menneg. BUMN | sebagai Ketua |
| 2. Alloy K. Ro
Kantor Menneg. BUMN | sebagai anggota |
| 3. Lumban Gaol
Direktur Persyaratan Kerja, Ditjen Binawas
Departement Tenaga Kerja | sebagai anggota |
| 4. Hermani Nur
Dit. Dana Luar Negeri, Departemen Keuangan | sebagai anggota |
| 5. Slamet Soedarsono
Dit. PUKMK, Bappenas | sebagai anggota |
| 6. Obrian Saragih
Dit. KLN Multilateral, Bappenas | sebagai anggota |
| 7. Nyoman Serutama
Dit. Dana Luar Negeri, Depkeu | sebagai anggota |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE